

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan dalam masyarakat Paga mengalami proses marginalisasi yang sistematis akibat internalisasi kultur patriarki yang bersifat opresif dan tidak adil. Marginalisasi ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga telah mengalami normalisasi struktural melalui berbagai praktik sosial yang dilegitimasi oleh sistem nilai dan norma yang berlaku. Dalam konteks masyarakat Paga, budaya patriarki menjadi basis utama terciptanya perilaku bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat dan marginal. Perilaku tersebut dapat berupa pembatasan ruang (*social space*), alokasi posisi yang hirarkis, dan penentuan peran yang timpang. Dalam tatanan sosial masyarakat tersebut, laki-laki mendominasi sebagai subjek aktif yang memiliki otoritas penuh dalam perumusan aturan adat, sedangkan perempuan direduksi sebagai objek pasif yang tunduk pada norma-norma (aturan adat) yang telah ditetapkan. Relasi kuasa yang timpang ini bertolak dari adanya sistem kelas sosial yang mendikotomikan peran gender secara rigid.

Dalam struktur sosial budaya Lio, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, *ata mosa laki*, yaitu dewan adat yang terdiri dari tujuh orang. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ketua adat (*laki pu'u*), sedangkan anggota lainnya (*ana laki*) memiliki tanggung jawab khusus, seperti mengawasi batas wilayah, menegakkan aturan adat, dan tugas-tugas lainnya. Kelompok kedua adalah *ata fai walu ana kalo*, yang merupakan masyarakat umum, terutama para ibu rumah tangga dan anak perempuan. Mereka bertugas melayani keluarga dengan mengurus kebutuhan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.¹

Baik lak-laki maupun perempuan sama-sama menghidupi budaya yang ada, tetapi secara khusus perempuan lebih banyak menanggung bebanataukonsekuensi atas warisan budaya yang represif. Salah satu contoh

¹Paul Arndt, *DuA NggaE, Wujud Tertinggi dan Upacara Keagamaan di Wilayah Lio* (Mauwere: Puslit Candraditya, 2002), hlm. 185.

produk budaya setempat terhadap perempuan, yakni adanya tradisi *pire*, yang merupakan larangan atau haram yang dikenakan pada perempuan Desa Paga dan perempuan yang menikahi laki-laki Desa Paga (*ana wa'u*). Larangan ini bersifat mengikat bagi perempuan untuk mengonsumsi berbagai jenis telur, seperti telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh. Selain itu, beberapa jenis sayur dan daging, termasuk terong, kacang panjang, daging biawak, daging rusa, dan daging babi, juga termasuk dalam kategori haram bagi perempuan. Menurut Bapak Yohanes Mangu, "*Pire* makanan dari tanaman dan hewan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar masyarakat Paga bersikap konformis terhadap tradisi ini. Tradisi ini dijalani tanpa pertimbangan kritis, dan banyak masyarakat tidak mengetahui secara pasti sejarah munculnya tradisi ini. Namun, secara umum, tradisi ini dimaknai sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap laki-laki."²

Justifikasi dominasi laki-laki dalam budaya patriarki masyarakat Paga juga diaktualisasikan dalam ritual *loka po'o*³ (upacara memohon kesuburan tanah).

Dalam pelaksanaan ritual ini, hanya laki-laki dewasa dari setiap keluarga yang diperbolehkan untuk berpartisipasi. Perempuan tidak diikutsertakan dalam ritual ini. Mereka tetap tinggal di rumah dan menyiapkan *nasi po'o* untuk dinikmati oleh keluarga setelah seluruh rangkaian ritual ini selesai. Mereka bahkan tidak diperbolehkan menghadiri ritual persembahan sesajen kepada *Dua Ngga'e*. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah kekhawatiran akan 'kenajisan' yang mungkin dibawa perempuan, terutama jika sedang menstruasi. Praktik ini mencerminkan bagaimana tradisi ini memposisikan perempuan secara hirarkis lebih rendah, bahkan mengaitkan mereka dengan simbol 'kekotoran'.⁴

² Hasil wawancara dengan Yohanes Berkhmans Mangu, Mosa Laki Desa Paga, pada 11 November 2024.

³ Secara harfiah, kata *po'o* berarti ruas bambu tempat air. Upacara *loka po'o* adalah upacara mempersembahkan sesajen kepada kekuatan langit tertinggi (*Dua Wula*) dan kepada kekuatan bumi terdalam (*nggaE tana*). Menurut keyakinan suku Lio Mego, *Dua Wula* (langit) berjiwa lelaki, sedangkan *nggaE Tana* (bumi) berjiwa perempuan. Perjumpaan keduanya dalam 'perkawinan kosmos' memberikan kesuburan tanah. Upacara 'perkawinan' ini dilaksanakan dalam upacara *loka po'o* yang biasanya diadakan bulan September atau Oktober setiap tahun. Hasil wawancara dengan Petrus Doi, pemangku adat Suku Mbengu, pada 12 November 2024.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Berkhmans Mangu, mosalaki suku Mbengu, pada 11 November 2024.

Selain itu, terdapat juga larangan-larangan lain yang harus ditaati oleh perempuan, seperti yang dialami Martina Dule. Wanita berumur 45 tahun ini memberi kesaksian bahwa dirinya tidak diperbolehkan berada di bawah atap rumah yang sama dengan bapak mertuanya. Ketika bapak mertuanya berkunjung, Martina harus meninggalkan rumah dan berjalan-jalan ke rumah tetangga, kemudian kembali ke rumah setelah bapak mertuanya pulang. Hal ini dilakukan agar menghindari kontak langsung dengan bapa mertuanya. Selain itu, ia juga tidak boleh berboncengan dengan bapak mertua, tidak boleh masuk kamar mertua, tidak boleh menyentuh pakaian mertua, bahkan saat hujan sekalipun ia tidak boleh menyentuh pakaian mertuanya yang sedang dijemur. Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini menerangkan, “Kalau saat dijemur dan hujan, biasanya saya menggunakan kayu untuk mengangkat pakaian mertua di jemuran.”⁵

Praktik-praktik di atas menunjukkan adanya penguatan struktur patriarki yang sistematis, di mana perempuan terus menerus teralienasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Menurut Pyke, terdapat tiga anggapan dasar yang melandasi praktik marginalisasi perempuan dalam budaya patriarki. *Pertama*, konstruksi sosial yang sejatinya lebih menguntungkan kaum laki-laki, dan seringkali dianggap mewakili kepentingan kolektif. *Kedua*, hegemoni budaya seperti ini telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, sehingga cenderung diterima secara *taken for granted* sebagai suatu kebenaran mutlak. *Ketiga*, dengan menafikan ketidakseimbangan struktural antara kelompok berkuasa dan yang termarginal, sistem patriarki justru dianggap sebagai penjaga stabilitas sosial.⁶ Tiga asumsi ini mengartikulasikan kondisi sosial budaya yang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Masyarakat patriarkal mengkonstruksi relasi gender yang asimetris melalui pewarisan nilai-nilai budaya. Laki-laki ditempatkan sebagai pemegang otoritas utama dengan akses penuh terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, sedangkan perempuan dikonfinasi (direduksi) pada peran-peran terbatas yang secara sistemik mengurangi agensi mereka dalam masyarakat.

⁵ Hasil wawancara langsung dengan Martina Dule, pada 12 November 2024.

⁶ Muhadjir Darwin, “Maskulinitas: Posisi laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis” (ms). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 1-2.

Secara politik, kaum perempuan dinomorduakan dan tidak mempunyai akses yang memadai untuk menempati posisi strategis dalam masyarakat, karena suami sebagai kepala keluarga yang menentukan urusan yang bersifat publik. Berkaitan dengan status dan peran dalam masyarakat, M. Sulaeman menerangkan bahwa perempuan seringkali tidak diberi peluang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu yang strategis, karena perbedaan jenis kelamin sebagai determinan utama, sedangkan kapabilitas dan kompetensi individu cenderung diabaikan.⁷ Anggapan ini tampak dalam tatanan sosial masyarakat Desa Paga yang memberlakukan larangan terhadap perempuan untuk terlibat dalam kontestasi elektoral menjadi kepala desa. Perempuan tidak mempunyai akses sedikit pun untuk menjadi pemimpin, sekalipun ia mempunyai pendidikan yang tinggi. Bapak Frans Toda menegaskan, “Selama puluhan tahun, perempuan Desa Paga tidak pernah menempati posisi strategis dalam sistem kepemimpinan, semisal menjadi kepala desa, ketua stasi, atau pun mengepalai divisi tertentu dalam tatanan kultural masyarakat Desa Paga. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa perempuan hanya terikat pada tugas dalam ranah domestik (seputar urusan dapur, sumur, dan kasur).”⁸ Ada juga batasan-batasan dalam upacara adat seperti antar belis. Perempuan itu harus berada di belakang untuk mengurus dan menyiapkan makanan, sedangkan laki-laki menjadi juru bicara atau delegasi pada saat upacara adat di mulai.

Dalam kehidupan ekonomi, perempuan yang sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya, atau jika belum menikah dianggap sebagai milik ayah atau saudara laki-lakinya. Perempuan Desa Paga secara umum tidak mempunyai hak atas warisan harta orang tua. Harta hanya diwariskan kepada anak laki-laki dalam keluarga. Bapak Frans Toda menambahkan, “Dalam kasus tertentu, apabila keluarga tertentu tidak mempunyai anak laki-laki kandung, maka harta milik orang tua akan diwariskan kepada anak laki sepupu (anak saudara kandung bapak). Anak perempuan yang menikah akan meninggalkan orang tua, dan anak perempuan yang tidak menikah tetap tinggal dalam rumah yang diwariskan orang

⁷ M. Munandar Sulaeman, dkk., *Kekerasan terhadap Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 18.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Frans Toda pada 13 November 2024.

tua kandung kepada saudara sepupunya.”⁹ Hal ini diberlakukan secara turun temurun oleh adat, sehingga perempuan sendiri menganggapnya sebagai sebuah kebenaran dan menikmatinya, meskipun tidak pernah mendapatkan keadilan.

Secara psikologi, perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang lemah, terlalu sensitif, dan kadang banyak membawa malapetaka bagi keluarga. Persepsi ini menciptakan adanya larangan kepada perempuan yang sedang hamilatausedang menstruasi untuk pergi ke pantai pada saat musim ikan, karena ada keyakinan bahwa bila hal ini terjadi, banyak pelaut tidak mendapatkan ikan. Perempuan yang melanggar akan mengalami sakit berkepanjangan (terkena luka pada alat kelamin, payudara, dan bagian tubuh lainnya), dan bahkan konsekuensi terbesar ialah anak dalam kandungan akan mati.¹⁰

Realitas dan kerangka berpikir represif-diskriminatif pada masyarakat Desa Paga di atas merepresentasikan isu pelecehan terhadap kekhasan individual dan marginalisasi terhadap perempuan. Perlakuan-perlakuan dan norma adat yang berlaku menyebabkan perempuan menginternalisasi perasaan rendah diri dan mereduksi kehadiran mereka sebagai instrumenatausarana untuk memenuhi keinginan pihak dominan (laki-laki). Perempuan cenderung direduksi ke dalam peran-peran yang sempit (domestikasi), dianggap sebagai pribadi yang pasif, dan bergantung sepenuhnya pada otoritas laki-laki, serta distigma sebagai makhluk yang lemah, emosional dan tidak rasional. Satu-satunya perempuan yang diakui dalam masyarakat patriarki adalah perempuan yang memiliki karakter maskulin, yaitu perempuan yang dipandang dari sudut pandang laki-laki. Tipe perempuan ini sering kali diidentifikasi sebagai sosok yang menarik secara fisik, dengan tubuh yang ideal, dan berpayudara, sebagai seorang ibu yang menyusui anak, sebagai ibu rumah tangga yang aktif, serta sebagai individu yang taat pada larangan adat yang berlaku.

Charles Taylor memandang krusial untuk mengembangkan pemahaman kolektif bahwasanya formasi identitas seorang individu maupun kelompok mesti dibangun di atas fondasi pengakuan akan kesamaan. Pengakuan akan kesamaan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Berkhmans Mangu, pada 11 November 2024.

merujuk pada ide dan kesadaran kolektif bahwa semua manusia mesti dihormati secara sama karena masing-masing individu mempunyai martabat (*dignity*). Atas dasar kesamaan ini, perempuan wajib mengusahakan cara berada yang otentik sesuai kekhasan dan potensi alamiah yang melekat dalam dirinya. Setiap perempuan mesti bersikap jujur dengan diri sendiri (*being true to oneself*) dengan mengaktualisasikan seluruh di kualitas inheren (kemampuan berpikir dan bertindak) tanpa paksaan atas batasan dari entitas eksternal. Oleh karena itu, Yosef Keladu Koten dalam salah satu komentarnya menerangkan,

konsep dasar untuk menciptakan tatanan sosial yang egaliter terletak pada pengakuan terhadap potensi unik setiap individu. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas intelektual, otonomi kehendak, dan agensi moral yang memungkinkan mereka membedakan yang baik dari yang buruk. Pembedaan moral ini bersifat intuitif dan inheren, muncul dari pengakuan akan kesetaraan hakikat kemanusiaan.¹¹

Komentar tersebut menegaskan salah satu aspek yang mendukung formasi identitas seorang manusia, dan secara khusus perempuan, yakni pengaktualisasian potensi diri. Perwujudan itu oleh Charles Taylor dipahami sebagai upaya penguatan otentisitas diri guna memperoleh perlakuan egaliter dalam suatu masyarakat multikultural.¹² Otentisitas yang dimaksud ialah bagaimana seharusnya perempuan 'ada' dalam tatanan sosial patriarki. Apakah perempuan menginternalisasi begitu saja identitas palsu (*fake identity*) yang dikonstruksikan secara represif oleh sistem patriarki yang mengutamakan dominasi kaum laki-laki, ataukah perempuan berani mengevaluasi secara kritis nilai kultur patriarki dalam terang nilai dan potensi universal, serta menolak asimilasi kekhasan atau potensi dirinya ke dalam kelompok dominan (laki-laki). Realitas marginal (sistem patriarki) atas perempuan dalam tatanan sosial masyarakat Paga jelas menciptakan

¹¹ Yosef Kladu Koten, "Politik Pengakuan Akan Kesamaan dan Perbedaan", dalam "Multikulturalisme Menerobos Ketertutupan Kelompok," *Jurnal Ledalero*, 9:1 (Ledalero: Juni 2010), hlm. 29-30.

¹² Otto Gusti Madung, "Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor", dalam "Multikulturalisme Menerobos Ketertutupan Kelompok," *Jurnal Ledalero*, 9: 1 (Ledalero: Juni 2010), hlm. 10.

identitas palsu. Patriarki mengkonfrontasi perempuan pada ‘konflik hirarkis’¹³ dan ‘bias negatif’.¹⁴

Identitas perempuan adalah pribadi yang bebas dan mempunyai martabat yang sama dengan laki-laki. Klaim kesetaraan ini muncul seiring transformasi konsep martabat (*dignity*) ke arah yang lebih inklusif, di mana martabat perempuan adalah hak bawaan yang tak terpisahkan.¹⁵ Karena kesamaan ini, perempuan pantas mendapat perlakuan egaliter sebagaimana laki-laki diperlakukan. Perempuan tidak boleh terbelenggu oleh instrumen represif mana pun, entah itu budaya, etnis, maupun regulasi negara.

Guna mewujudkan pengakuan yang positif, Taylor menolak praktik-praktik sosial yang mengabaikan dan meremehkan kekhasan identitas individu atau kelompok minoritas. Pengakuan ini diusahakan melalui dialog intersubjektif dalam lingkungan intim dengan *significant other*, maupun pada lingkungan publik dengan mengupayakan dialog kritis-deliberatif dengan entitas eksternal lainnya. Dalam konteks patriarki, dialog diupayakan untuk mengadvokasi kepentingan bersama, secara khusus agensi perempuan.

Korelasi esensial antara pengakuan dan identitas dijelaskan oleh Taylor dalam tesisnya sebagai berikut.

*Our identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the misrecognition of others, and so a person or a group of people can suffer real damage, real distortion if the people or society around them mirror back to them a confining or demeaning or contemptible picture of themselves. Non-recognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted and reduced mode of being.*¹⁶

¹³ Konsep ini menggambarkan situasi di mana terdapat ketidaksetaraan dan pertikaian antara individu atau kelompok, di mana satu pihak mungkin mendominasi atau mendiskriminasi pihak lainnya. Dalam konteks ini, hubungan antarkelompok tidak harmonis dan dipenuhi ketegangan serta perbedaan yang mencolok.

¹⁴ Konsep ini merujuk pada kecenderungan orang untuk lebih fokus pada aspek negatif dari situasi atau karakteristik orang lain, sering kali mengabaikan aspek positif.

¹⁵ Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam Amy Gutman (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition* (New Jersey: Princeton University Press, 1994), hlm. 37.

¹⁶ Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam Amy Gutman (ed.), *op. cit.*, hlm. 25.

Tesis tersebut menjadi basis legitimasi untuk mengkritisi hegemoni budaya patriarki pada masyarakat Paga yang cenderung mendeformasi identitas perempuan melalui praktik-praktik ketidakadilan, semisal: alienasi, marginalisasi, dan stereotip yang destruktif. Tesis ini mengartikulasikan kebergantungan bangunan identitas individu atau kelompok pada pengakuan atau penyangkalan dari pihak lain. Tanpa pengakuan sosial, identitas seseorang atau kelompok dapat mengalami kehancuran. Penolakan terhadap identitas tidak hanya melahirkan stigma buruk, tetapi juga menginternalisasi citra negatif pada subjek yang ditolak. Alhasil, terjadi distorsi dalam memahami diri (*self-conception*), di mana individu atau kelompok yang terpinggirkan mengadopsi persepsi inferior yang dilekatkan masyarakat dominan. Sebagaimana dijelaskan oleh Taylor, gerakan feminis menjadi contoh ilustratif dalam konteks ini. Para teoritis feminis mengemukakan bahwa perempuan dalam struktur patriarki sering kali menginternalisasi representasi negatif yang dikonstruksi oleh masyarakat maskulin, sehingga membentuk suatu kesadaran palsu, dan memperkuat relasi kuasa yang timpang. Hal ini menghambat pengembangan diri, karena mereka kekurangan motivasi dan aspirasi untuk maju.¹⁷ Akibatnya, banyak perempuan tidak dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan status mereka, terjebak dalam penindasan yang disebabkan oleh citra diri yang telah lama terbangun dalam masyarakat patriarki.

Bertolak dari pemahaman ini, Charles Taylor secara implisit menjustifikasi kultur patriarki sebagai aktualisasi pengakuan yang keliru terhadap perempuan sehingga perempuan mengalami penderitaan mental atau terjebak dalam gambaran diri yang salah, distorsif, dan reduktif. Oleh karena itu, Taylor mengupayakan terciptanya pengakuan yang positif terhadap perempuan dalam budaya patriarki dengan meyakinkan kelompok dominan secara rasional untuk mengubah pandangan atau kerangka berpikir opresif-destruktif melalui argumen intelektual dan seruan moral dengan menekankan metode refleksi filosofis dan yuridis.¹⁸ Refleksi itu mengarah pada usaha mewujudkan 'koeksistensi egaliter'¹⁹

¹⁷ Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm. 92.

¹⁸ Yosef Kladu Koten, *op. cit.*, hlm. 33.

¹⁹ Koeksistensi egaliter merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis dan setara, tanpa adanya hirarki atau diskriminasi. Konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan dan saling menghormati antara berbagai pihak,

dengan landasan kesadaran akan identitas diri yang otentik dan khas, dan bahwasannya perempuan tidak hanya dibiarkan hidup, tetapi diakui memiliki keunggulan dan nilai moral dalam dirinya.

Realitas empiris dan kajian teoretis di atas memantik minat penulis untuk menganalisis secara komprehensif upaya penghormatan terhadap perempuan dalam perspektif otentisitas dan pengakuan Charles Taylor. Penelitian ini dikaji dengan judul: **KONSEP OTENTISITAS DAN PENGAKUAN CHARLES TAYLOR DAN RELEVANSINYA BAGI PENGHARGAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI MASYARAKAT DESA PAGA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah permasalahan utama yang menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini, yakni: bagaimana upaya penghormatan terhadap perempuan dalam budaya patriarki masyarakat Desa Paga dijelaskan dalam terang konsep otentisitas dan pengakuan Charles Taylor? Rumusan masalah utama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan masalah turunan, yaitu: bagaimana konsep otentisitas dan pengakuan menurut Charles Taylor? Apa itu budaya patriarki? Bagaimana eksistensi dan peran perempuan dalam kultur masyarakat Desa Paga?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan skripsi ini ialah menelaah konsep otentisitas dan pengakuan Charles Taylor sebagai basis legitimasi teoretis penghormatan terhadap perempuan pada masyarakat Desa Paga. Selain itu, penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tuntutan akademis dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Filsafat Agama Katolik.

baik dalam konteks sosial, budaya, maupun politik. Dalam koeksistensi egaliter, setiap individu memiliki hak dan peluang yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang, seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Tujuan dari koeksistensi ini adalah menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua suara didengar.

1.4 Metodologi Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, deskriptif, dan interpretatif atas teks dari literatur-literatur tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan studi pustaka. Metode penelitian ini ditempuh dengan mencari dan membaca literatur yang dibutuhkan sesuai dengan tema yang dipilih, seperti sejumlah buku (termasuk *e-book*), kamus, jurnal, *website (internet)*, dan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat pada masyarakat Desa Paga.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “Konsep Otentisitas dan Pengakuan Charles Taylor dan Relevansinya bagi Penghargaan terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki Masyarakat Paga” dibahas dalam sistematika penulisan berikut.

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II memberi perhatian khusus pada deskripsi tentang Charles Taylor dan pemikirannya. Pembahasan diawali dengan menerangkan riwayat hidup dan karya Charles Taylor. Selain itu, diterangkan pula latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Charles Taylor, dan pandangannya tentang otentisitas dan pengakuan, serta konsep martabat manusia.

Bab III menerangkan perempuan dalam budaya patriarki pada Desa Paga. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang sejarah dan keadaan desa Paga, eksistensi, dan peran perempuan dalam kultur masyarakat Desa Paga

Bab IV merupakan bagian inti dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini, penulis menguraikan relevansi konsep otentisitas dan pengakuan Charles Taylor sebagai basis teoretis penghargaan terhadap perempuan dalam budaya patriarki masyarakat Desa Paga.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam karya tulis ini, serta beberapa usulan dan saran yang bermanfaat bagi upaya penghargaan terhadap perempuan pada masyarakat Desa Paga.

